

**REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL KAB. HSS
TAHUN 2014-2018**



**Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Kamboja No. 3 Kandangan 71212, Telpon/Fax (0517) 21123**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 yang memuat Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dilaksanakan hingga tahun 2018.

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 ini dilakukan untuk mengakomodir perubahan Susunan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang semula adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Revisi Renstra juga dititikberatkan pada penyempurnaan tujuan, sasaran, indikator sasaran (*impact*), indikator program (*outcome*) dan indikator kegiatan (*output*) sehingga sesuai dengan indikator dan target kinerja yang relevan dan terukur untuk setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap Revisi Renstra ini dapat berguna bagi pihak-pihak terkait dan dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tentunya dalam penyusunan Revisi Renstra ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diperlukan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Revisi Renstra ini.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Kandangan, Maret 2017

Kepala Dinas Sosial
Kab. Hulu Sungai Selatan,



Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670328 198609 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	7
2.2 Sumber Daya	12
2.3 Kinerja Pelayanan.....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	22
BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.....	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	42
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi	44
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	45
4.3 Strategi dan Kebijakan	49

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN	
5.1 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	54
5.2 Indikator Program dan Kegiatan.....	57
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	77
BAB VII PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur pada Dinas Sosial Kab. HSS	12
Tabel 2.2	Hasil Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2008 – 2013	20
Tabel 2.3	Analisa Lingkungan Strategis (SWOT).....	25
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.....	34
Tabel 3.2	Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dengan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia	40
Tabel 3.3	Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	42
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial.....	46
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	51
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	58
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Terkait Tupoksi Dinas Sosial Kab. HSS.....	77
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Sasaran SKPD Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota.....	2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Renstra merupakan komitmen Dinas Sosial yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif". Proses penyusunan Renstra SKPD harus mengacu pada lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008. Proses penyusunan Renstra OPD harus mengacu pada lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008.

Gambar 1.1 memperlihatkan bagan alir penyusunan Renstra OPD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut maka, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun perubahan Rencana Strategis Tahun 2014-2018 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang sosial.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Revisi Renstra Dinas Sosial yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali,

- diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 19. Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 20. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 387 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Periode 2017 – 2018.

b. Tujuan

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 ini bertujuan memperlancar Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam

rangka mendukung tercapainya Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2014 – 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah ringkasan dari keseluruhan uraian Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategis dan Kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini dikemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini diuraikan kaidah-kaidah untuk melaksanakan dokumen Renstra Dinas Sosial.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13 Tanggal 04 Oktober 2016). Sedangkan Tugas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 61 Tanggal 02 Desember 2016) adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Sosial;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Bupati tersebut dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdiri dari :

- **Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, kerjasama hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- **Subbagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan sosial keluarga miskin, fasilitasi peningkatan akses masyarakat miskin serta pemberdayaan potensi dan lembaga sosial, terdiri dari :

- **Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan pemberdayaan sosial keluarga miskin.
- **Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Akses Masyarakat Miskin** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan fasilitasi dan peningkatan akses masyarakat miskin.
- **Seksi Pemberdayaan Potensi dan Lembaga Sosial** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan pemberdayaan potensi dan lembaga sosial.

4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, pelayanan sosial anak dan lanjut usia, terdiri dari :

- **Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan pelayanan sosial anak dan lanjut usia.
- **Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang cacat dan tuna sosial.

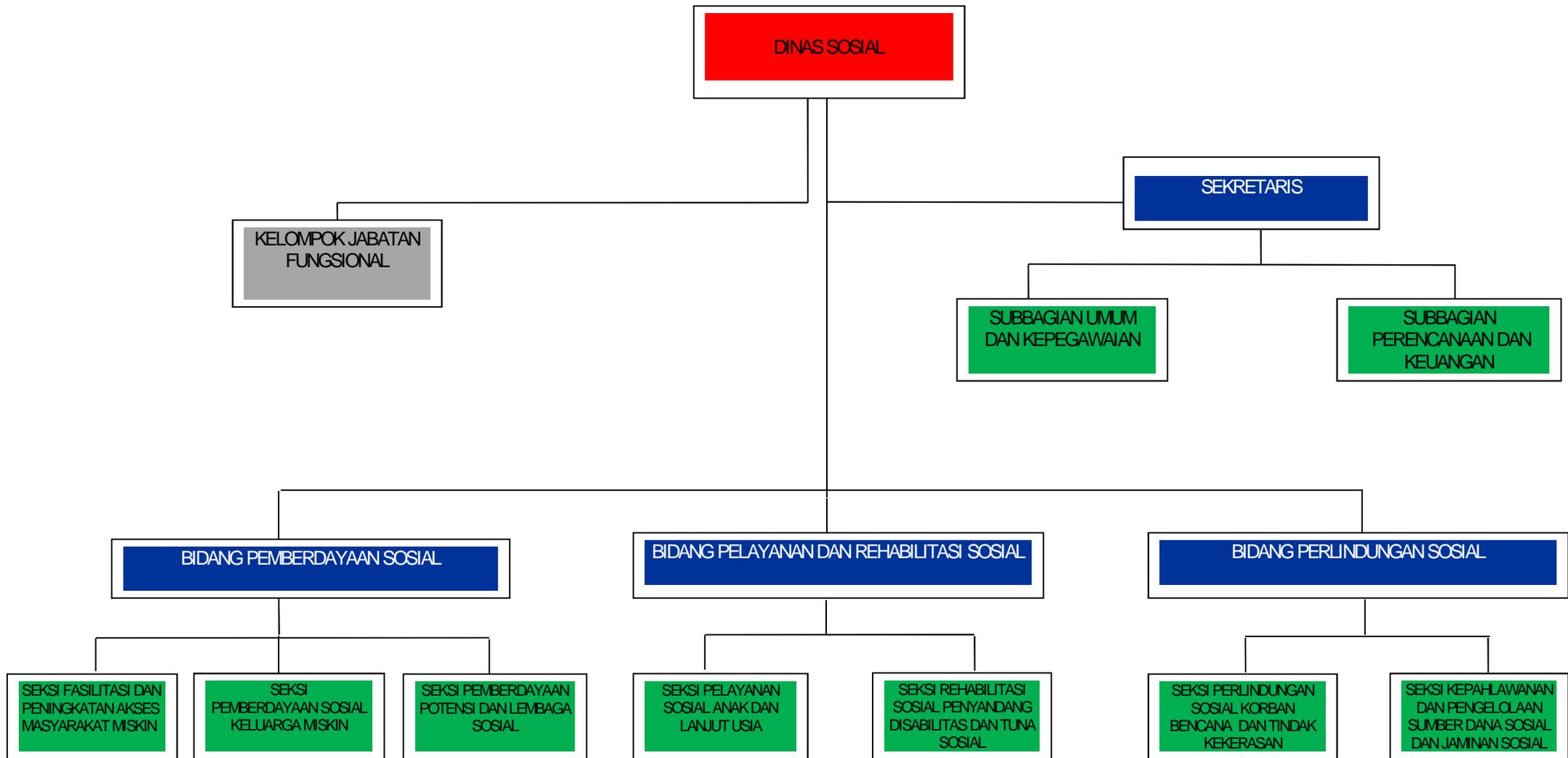
5. Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana dan korban tindak kekerasan, kepahlawanan, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial, terdiri dari :

- **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Korban Tindak Kekerasan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan perlindungan sosial bagi korban bencana dan korban tindak kekerasan.
- **Seksi Kepahlawanan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan kepahlawanan dan pengelolaan sumber dana jaminan sosial.

Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial



2.2 Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kab.HSS didukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Sosial Kab. HSS

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
I. DINAS			
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kepala Dinas
II. SEKRETARIAT			
1	Pejabat Administrator	1	Sekretaris
2	Pejabat Pengawas	1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Pengadministrasi Kepegawaian	1	
	Pengadministrasi Persuratan	1	
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Kantor	1	
	Pengolah Data Sarana dan Prasarana Kantor	1	
	Pengemudi	1	Tenaga Kontrak
	Pramu Kebersihan	1	
	Pramu Bakti	-	Kurang
	Pramu Taman	-	Kurang
	Petugas Keamanan	-	Kurang
3	Pejabat Pengawas	1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	
	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	-	Kurang
	Bendahara	1	
	Pengadministrasi Keuangan	1	
	Pengelola Gaji	1	

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
III. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL			
1	Pejabat Administrator	1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
2	Pejabat Pengawas	1	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	-	Kurang
	Pengelola Bimbingan Sosial	-	Kurang
	Pengelola Pembinaan Bantuan	-	Kurang
3	Pejabat Pengawas	1	Kepala Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Akses Masyarakat Miskin
	Analisis Masalah Sosial	1	
	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	-	Kurang
	Pengelola Data Bantuan Sosial	-	Kurang
4	Pejabat Pengawas	1	Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi dan Lembaga Sosial
	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	1	
	Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	1	
	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	-	Kurang
IV. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL			
1	Pejabat Administrator	1	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
2	Pejabat Pengawas	1	Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia
	Pengadministrasi Anak Terlantar	1	
	Analisis Pelayanan Sosial	-	Kurang
	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	-	Kurang

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
3	Pejabat Pengawas	1	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial
	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	1	
	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	-	Kurang
	Penyuluh Bimbingan Konseling Bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial	-	Kurang
	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	-	Kurang
V. BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL			
1	Pejabat Administrator	1	Kepala Bidang Perlindungan Sosial
2	Pejabat Pengawas	1	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Korban Tindak Kekerasan
	Pengelola Perlindungan Sosial	2	
	Pengelola Bimbingan dan Konseling	-	Kurang
3	Pejabat Pengawas	1	Kepala Seksi Kepahlawanan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial
	Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum	1	
	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	
	Pengelola Data Bantuan Sosial	-	Kurang
Jumlah Sumber Daya Aparatur		35 Orang	
Jumlah Kurangnya Sumber Daya Aparatur			17 Orang

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi, adalah sebagai berikut:

- ❖ Gedung kantor, yang terdiri atas: ruang kerja, ruang tamu, aula/ruang rapat, gudang *bufferstock* bencana, mushola, posko bencana, dan garasi mobil operasional.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
 - Meubelair.
 - Komputer, laptop dan printer yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan.
 - Fasilitas Telekomunikasi dan internet.
 - Dan lain-lain.
- ❖ Kendaraan dinas yang mendukung kegiatan operasional, seperti:
 - Mobil Pick up untuk logistik bencana.
 - Mobil *Rescue Technical Unit* (RTU) Bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
 - Mobil Tangki Bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
 - *Speedboat* dan perahu karet.

2.3 Kinerja Pelayanan

Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan Kelapa Daerah melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
 - Kegiatan Pendampingan Usaha bagi Keluarga Miskin;
 - Kegiatan Penyaluran Pangan bagi Masyarakat Miskin;
 - Kegiatan Koordinasi Program Rumah Sejahtera;
 - Operasional Program Keluarga Harapan.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
 - Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Miskin dan Terlantar;
 - Kegiatan Penyediaan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana.

3. Program Pembinaan Anak Terlantar.
 - Kegiatan Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar;
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial terhadap Anak.
4. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
 - Kegiatan Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial dan Masyarakat Terlantar;
 - Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi.
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
 - Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
 - Kegiatan Pembinaan Kepeloporan, Keperintisan, dan Kepahlawanan;
 - Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 - Peningkatan Peran Aktif Organisasi dan Relawan Penanggulangan Bencana;
 - Peningkatan Kesetiakawanan Sosial Masyarakat.

Sedangkan tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2012 pada sekretariat dan masing-masing bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada Sekretariat

a) Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Gaji dan Tunjangan, hasil capaiannya adalah terbayarnya gaji dan tunjangan karyawan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-menyurat, hasil capaiannya adalah tersedianya layanan surat-menyurat.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, hasil capaiannya adalah tersedianya layanan telepon, air bersih dan listrik untuk keperluan kantor.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, hasil capaiannya adalah tersedianya layanan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kantor.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, hasil capaiannya adalah tersedianya layanan perbaikan peralatan kerja kantor.
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, hasil capaiannya adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, hasil capaiannya adalah tersedianya layanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, hasil capaiannya adalah tersedianya makan dan minum rapat.
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, hasil capaiannya adalah tersedianya dana perjalanan dinas ke luar kabupaten.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya, hasil capaiannya adalah tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya.
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, hasil capaiannya adalah tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah.

b) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, hasil capaiannya adalah terpeliharanya gedung kantor.

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, hasil capaiannya adalah terpenuhinya pakaian dinas PDH karyawan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, hasil capaiannya adalah tersusunnya laporan realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2) Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- Kegiatan Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya, hasil capaiannya adalah telah melakukan pembinaan terhadap 72 KK warga KAT.
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin, hasil capaiannya adalah telah memberikan bantuan Usaha Ekonomis Produktif kepada 9 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) keluarga miskin.

b) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat, hasil capaiannya adalah telah memberikan pembinaan terhadap 72 organisasi sosial.

c) Program Keluarga Harapan

- Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, hasil capaiannya adalah telah melakukan pendampingan dan administrasi Program Keluarga Harapan dan melaksanakan rehabilitasi/perbaikan gedung sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH).

d) Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, hasil capaiannya adalah telah melakukan rehabilitasi/perbaikan terhadap 100 buah rumah tidak layak huni.

3) Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

a) Program Pembinaan Anak Terlantar

- Kegiatan Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar, hasil capaiannya adalah telah melakukan pembinaan terhadap 40 orang anak terlantar.

b) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

- Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, hasil capaiannya adalah telah memberikan bantuan terhadap 139 orang penyandang masalah sosial.

c) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Kegiatan Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia, hasil capaiannya adalah telah memberikan santunan terhadap 72 orang lanjut usia.

d) Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

- Kegiatan Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma, hasil capaiannya adalah telah memberikan pembinaan terhadap 128 orang penyandang cacat.

4) Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

a) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Kegiatan Pelayanan Psikososial bagi PMKS di *Trauma Centre* Termasuk bagi Korban Bencana, hasil capaiannya adalah telah memberikan bantuan terhadap 89 KK yang menjadi korban bencana serta pelatihan dan pembinaan bagi 76 orang relawan sosial.

b) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman, hasil capaiannya adalah telah melaksanakan pembangunan tempat pemakaman muslimin terpadu (TPMT) dan Pesantren Tahfizul Qur'an pada areal seluas 2 hektar di Desa Gambah Walangku.

c) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Kegiatan Pembinaan Kepeloporan, Keperintisan, dan Kepahlawanan, hasil capaiannya adalah telah memberikan santunan kepada 160 orang veteran dan janda veteran serta pengelolaan areal Taman Makam Pahlawan Pusara Bakti Banua.

Seluruh hasil kinerja Renstra Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode sebelumnya (2008 – 2013) dapat dicerminkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2**Hasil Pencapaian Target Indikator Kinerja
Tahun 2008 – 2013**

No	Indikator Kinerja (Output)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Tersalurkannya Bantuan Paket Sembako			1.500 Org	900	1050	1200	1350	1500	880	456	159	0	0	97,78	43,42	13,25	0,00	0,00
2	Tersalurkannya Bantuan Paket Usaha Ekonomis Produktif			175 KK	75	100	125	150	175	80	80	78	70	0	106,67	80,00	62,40	46,67	0,00
3	Tersalurkannya Bantuan korban bencana			3000 KK	1000	1500	2000	2500	3000	530	42	47	89	783	53,00	2,80	2,35	3,56	26,10
4	Terlaksananya Pemugaran rumah keluarga miskin /korban bencana			60 buah	40	50	60	60	60	10	10	10	100	99	25,00	20,00	16,67	166,67	165,00
5	Terlaksananya Pelatihan relawan sosial penanggulangan bencana			300 orang	100	150	200	250	300	50	81	30	76	76	50,00	54,00	15,00	30,40	25,33
6	Terlaksananya Pembentukan BPK diKecamatan			11 BPK	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	100	-	-	-	-
7	Terlaksananya Pembuatan peta dan data daerah rawan bencana			9 titik rawan	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	100	-	-	-	-
8	Tersalurkannya Bantuan tali asih kepada anggota veteran dan janda veteran			242 orang	242	242	242	242	242	242	242	242	160	160	100	100	100	66,12	66,12
9	Tersalurkannya Bantuan bahan bangunan rumah untuk anggota veteran dan janda veteran			88 buah rumah	242	242	242	242	242	242	242	242	160	160	100	100	100	66,12	66,12

10	Terlaksananya pemberian Bantuan umrah ke Mekkah untuk anggota veteran dan janda veteran	21 orang	9	12	15	18	21	3	3	3	3	3	33,33	25,00	20,00	16,67	14,29
11	Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional dalam 1 Tahun	5 kali	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
12	Terlaksananya Penyantunan kepada penyandang cacat dan eks.trauma	960 orang	480	600	720	840	960	313	139	129	128	142	65,21	23,17	17,92	15,24	14,79
13	Terlaksananya Pembinaan penyandang cacat dan eks.trauma	346 orang	146	196	246	296	346	34	34	30	35	96	23,29	17,35	12,20	11,82	27,75
14	Terlaksananya Pembinaan anak terlantar	500 orang	180	260	340	420	500	103	131	35	40	60	57,22	50,38	10,29	9,52	12,00
15	Terlaksananya Penyantunan lanjut usia	3190 orang	990	1540	2090	2640	3190	1100	880	81	170	80	111,11	57,14	3,88	6,44	2,51
16	Terlaksananya Penyantunan penyandang penyakit sosial	170 orang	50	80	110	140	170	130	130	86	209	88	260,00	162,50	78,18	149,29	51,76
17	Terlaksananya Peningkatan kesejahteraan pemenuhan kebutuhan pokok bagi anak panti	580 anak panti	580	580	580	580	580	411	411	411	411	411	70,86	70,86	70,86	70,86	70,86
18	Terlaksananya Peningkatan jumlah karang taruna	75 karang taruna	35	45	55	65	75	11	11	11	11	11	31,43	24,44	20,00	16,92	14,67
19	Terlaksananya Peningkatan jumlah kader TKSM	368 TKSM	248	278	308	338	368	30	30	30	30	30	12,10	10,79	9,74	8,88	8,15
20	Terlaksananya Peningkatan kondisi kehidupan warga KAT dengan mempunyai tempat tinggal sendiri dan hidup secara layak	806 KK	506	506	656	656	806	445	154	72	72	0	87,94	30,43	10,98	10,98	0,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa pengembangan pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah analisa SWOT/Analisa Lingkungan Strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan kedepannya.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Potensi (kekuatan) yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

- 1) Dukungan sumber daya manusia yang potensial.
- 2) Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, Relawan Sosial yang mendukung program pembangunan di bidang sosial.
- 3) Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.
- 4) Motivasi dan keseriusan pegawai untuk menciptakan good governance.

b. Kelemahan (kendala) yang ada yaitu :

- 1) Koordinasi antar instansi vertikal dan horisontal belum optimal.
- 2) Kompetensi dan jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.
- 3) Referensi data dan informasi yang masih rendah.
- 4) Perkembangan permasalahan yang ada di masyarakat lebih cepat daripada proses pelaksanaan kegiatan untuk penanganan masalah sosial yang ada.
- 5) Perubahan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang

Peluang yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

- 1) Adanya visi dan misi yang menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang sosial.
- 2) Kebijakan dan regulasi pemerintah pusat yang mendukung pembangunan di bidang sosial.
- 3) Apresiasi stakeholder terhadap pembangunan di bidang sosial yang tinggi.
- 4) Situasi dan kondisi daerah yang relatif kondusif.

b. Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain yaitu :

- 1) Masyarakat menuntut hasil pelaksanaan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 2) Angka kemiskinan yang harus terus diturunkan.
- 3) Otonomi daerah menuntut perubahan paradigma yang mandiri disegala bidang.
- 4) Pelayanan kepada masyarakat yang perlu terus ditingkatkan.

Dari beberapa faktor lingkungan internal dan eksternal dapat diinteraksikan sebagai berikut :

1. Interaksi Peluang-Potensi (P-P)

- a. Motivasi SDM potensial dibidang sosial yang didukung apresiasi stakeholder terhadap pembangunan daerah menciptakan good governance.
- b. Adanya dukungan dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat menunjang percepatan pengembangan dan pembangunan daerah dibidang sosial.
- c. Pelaksanaan pembangunan yang didukung oleh ketersediaan sarana prasarana dan kondisi daerah yang relatif kondusif menjadikan pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan efisien.

2. Interaksi Peluang-Tantangan (P-T)

- a. Pelaksanaan pembangunan dibidang sosial yang akuntabel dan transparan berdasarkan aspirasi masyarakat merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat secara optimal.
- b. Keterlibatan masyarakat bersama aparatur pemerintah dalam proses pembangunan menciptakan sinergitas dalam menurunkan angka kemiskinan.
- c. Pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada good governance merupakan perubahan paradigma dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang mandiri.

3. Interaksi Kelemahan-Potensi (K-P)

- a. Peningkatan koordinasi antar instansi menjadikan proses pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan kualitatif.
- b. Regulasi dan kebijakan pembangunan yang konsisten disertai ketersediaan anggaran yang memadai memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan referensi data yang akurat dalam implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara konsisten merupakan landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan.

4. Interaksi Kelemahan-Tantangan (K-T)

- a. Kondisi daerah dengan angka kemiskinan yang masih tinggi menuntut pembangunan di bidang sosial yang lebih dinamis.
- b. Kompetensi dan profesionalitas aparatur perlu terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal.
- c. Data dan informasi yang akurat sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga hasilnya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tabel 2.3

Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)

<p>Eksternal</p>	<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Adanya visi dan misi yang menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang sosial.2. Kebijakan dan regulasi pemerintah pusat yang mendukung pembangunan di bidang sosial.3. Apresiasi stakeholder terhadap pembangunan di bidang sosial yang tinggi.4. Situasi dan kondisi daerah yang relatif kondusif.	<p>Tantangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat menuntut hasil pelaksanaan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial.2. Angka kemiskinan yang harus terus diturunkan.3. Otonomi daerah menuntut perubahan paradigma yang mandiri disegala bidang.4. Pelayanan kepada masyarakat yang perlu terus ditingkatkan.
-------------------------	---	--

Potensi/Kekuatan	Interaksi (P-P)	Interaksi (P-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan sumberdaya manusia yang potensial. 2. Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, Relawan Sosial yang mendukung program pembangunan di bidang sosial. 3. Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai. 4. Motivasi dan keseriusan pegawai untuk menciptakan good governance. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi SDM potensial dibidang sosial yang didukung apresiasi stakeholder terhadap pembangunan daerah menciptakan good governance. 2. Adanya dukungan dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat menunjang percepatan pengembangan dan pembangunan daerah di bidang sosial. 3. Pelaksanaan pembangunan yang didukung oleh ketersediaan sarana prasarana dan kondisi daerah yang relatif kondusif menjadikan pelaksanaan kegiatan semakin efektif dan efisien. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembangunan di bidang sosial yang akuntabel dan transparan berdasarkan aspirasi masyarakat merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat secara optimal. 2. Keterlibatan masyarakat bersama aparatur pemerintah dalam proses pembangunan menciptakan sinergitas dalam menurunkan angka kemiskinan. 3. Pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada good governance merupakan perubahan paradigma dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang mandiri.

Kelemahan	Interaksi(K-P)	Interaksi(K-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar instansi vertikal dan horisontal belum optimal. 2. Kompetensi dan jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas. 3. Referensi data dan informasi yang masih rendah. 4. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal. 5. Perubahan regulasi menjadi kendala pelaksanaan kegiatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi antar instansi menjadikan proses pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan kualitatif. 2. Regulasi dan kebijakan pembangunan yang konsisten disertai ketersediaan anggaran yang memadai memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan. 3. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan referensi data yang akurat dalam implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara konsisten merupakan landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi daerah dengan angka kemiskinan yang masih tinggi menuntut pembangunan di bidang sosial yang lebih dinamis. 2. Kompetensi dan profesionalitas aparatur perlu terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. 3. Data dan informasi yang akurat sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan isu strategis penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis PSKS terdiri dari : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Penyuluh Sosial, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan bidang sosial diuraikan sebagai berikut :

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sesuai data dari BPS Kalsel adalah sebesar 6,67%. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 sebesar 4,76%.
2. Belum optimalnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau

- memperkuat usaha kesejahteraan sosial;
3. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, maka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan;
 4. Adanya pergeseran-pergeseran norma yang terus terjadi dimasyarakat dapat melunturkan rasa patriotisme, semangat juang, semangat kepahlawanan dan menghargai para pejuang, oleh karena itu nilai-nilai kepahlawanan perlu terus dilestarikan;
 5. Pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial masih perlu lebih ditingkatkan menuju pelayanan prima.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI :

“ Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Agamis dan Produktif ”

Pemahaman terhadap visi di atas ada 3 (tiga) keadaan yang dicitakan, yaitu:

“Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera” yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial.

“ Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis” yang ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai- nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Produktif” yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas

penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi yang diharapkan 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana visi tersebut di atas akan terlihat dari berbagai indikator yang diharapkan semakin baik dibanding periode sebelumnya yakni :

1. Pada aspek sumber daya manusia (SDM)

Ada 3 (tiga) hal pokok dalam pembangunan SDM, yaitu meningkatnya tingkat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan kehidupan sosial budaya masyarakat.

1.1. Bidang pendidikan, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya pendidikan yang dilandasi nilai-nilai dan moral agama, (b) meningkatnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, (c) meningkatnya pencapaian indikator keberhasilan bidang pendidikan, (d) Meningkatnya angka melek huruf, dan meningkatnya kompetensi profesional bagi tenaga pendidik. Pada tahapan pembangunan ketiga (2014- 2018) pada RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005- 2025 sasaran yang ingin dicapai adalah: rata-rata lama sekolah 9,84 tahun, angka melek huruf 98,99%, APK SD 116,43, APK SMP 105,14, APK SMA 45,76, APM SD 100, APM SMP 78,18 dan APM SMA 41,76.

1.2. Bidang Kesehatan, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya masyarakat yang sehat dan berkeadilan dalam mendapatkan pelayanan, (b) meningkatnya pencapaian indikator kesehatan dan (c) menurunnya angka kematian bayi (AKB), meningkatnya angka harapan hidup (AHH). Pada tahapan ketiga (2014- 2018) pada RPJP sasaran yang ingin dicapai adalah AHH 68,28 tahun, angka kematian ibu/ 100.000 KH sebesar 90 dan AKB/1.000 KH sebesar 5.

1.3. Bidang sosial budaya, yang ditunjukkan oleh: (a) semakin menguatnya wawasan kebangsaan, (b) semakin terwujudnya jati diri berdasarkan nilai-nilai agama, tata nilai dan adat istiadat serta budaya masyarakat, (c) menguatnya kepekaan sosial masyarakat, (d) terpelihara dan berkembangnya semua potensi sosial dan budaya masyarakat, dan (e) semakin meningkatnya budaya tertib masyarakat dan kepatuhan pada aturan.

2. Pada tata kelola pemerintahan,
 - 2.1. Politik dan hukum, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya ketertiban dan keamanan, (b) meningkatnya kepastian hukum, (c) meningkatnya budaya politik yang sehat dan (d) meningkatnya fungsi dan peran masyarakat dari lembaga politik yang efektif.
 - 2.2. Pemerintahan, yang ditunjukkan oleh; (a) meningkatnya etos kerja, produktivitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan, (b) meningkatnya pelayanan publik yang lebih baik, (c) terwujudnya *good governance* dan (d) meningkatnya pendapatan daerah yang disertai peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
 - 2.3 Pada aspek perekonomian daerah yang berbasis agribisnis dan agroindustri, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB riil 6,6% per tahun, penduduk miskin 4,5% dan pengangguran terbuka 3,60% .
 - 2.4 Sektor pertanian, yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya produksi dan produktivitas, (b) meningkatnya nilai tambah produk pertanian, (c) makin rendahnya alih fungsi lahan pertanian, (d) berkembangnya kawasan agropolitan, (e) optimalnya pemanfaatan waduk Amandit, (f) meningkatnya pendapatan petani dan peternak serta UMKM pelaku produk olahan berbasis pertanian
 - 2.5 Sektor industri dan perdagangan yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya nilai tambah produk- produk unggulan, (b) berkembangnya agroindustri, (c) meningkatnya daya saing UMKM, dan (d) meningkatnya peran Kota Kandungan sebagai pusat perdagangan wilayah Banua Anam.
 - 2.6 Bidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, yang ditunjukkan (a) semakin banyaknya pengusaha daerah sebagai pelaku utama ekonomi, (b) semakin tumbuh dan berkembangnya UMKM, dan (c) berkembangnya pembiayaan berbasis Syariah.
 - 2.7 Infrastruktur, yang ditunjukkan oleh : (a) terwujudnya keterpaduan sistem pembangunan infrastruktur, (b) bertambahnya kemampuan pelayanan air bersih, (c) meningkatnya jumlah dan kualitas penyediaan prasarana perumahan, (d) meningkatnya kemampuan penyediaan energi dan (e) meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian.

2.8 Tata ruang yang ditunjukkan oleh: (a) konsistensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan (b) adanya sinergi dan kerjasama antar wilayah.

- 3 Pada Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang ditunjukkan oleh: (a) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara SDA dan lingkungan, (b) rehabilitasi lahan- lahan kritis, (c) terpeliharanya DAS Amandit.
- 4 Pengembangan wilayah dan kawasan agropolitan yang ditunjukkan oleh semakin berfungsinya perkembangan wilayah dan kawasan agropolitan yang telah ditetapkan oleh daerah.
- 5 Pada kehidupan beragama, yang ditunjukkan oleh (a) meningkatnya masyarakat yang berakhlak mulia dengan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya secara kaffah sehingga terbentuk sikap religius, (b) meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dan merata melalui kesalehan dan kepedulian sosial umat, (c) meningkatnya kerukunan intern dan antar umat beragama, (d) meningkatnya jumlah dan fungsi sarana peribadatan serta kualitas pelayanannya dan (e) menurunnya tingkat kriminalitas, penyalahgunaan obat terlarang dan penurunan angka indeks korupsi.

Indikator- indikator di atas diharapkan akan terwujud secara bertahap dari tahun ke tahun hingga akhir 2018 yang akan datang, dan secara berkesinambungan sampai tahun 2025 sebagai perwujudan keadaan yang lebih baik sebagaimana indikator RPJPD Tahun 2005- 2025 yang dapat direalisasi sebagaimana yang direncanakan. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan misi.

MISI :

Guna mewujudkan visi sebagaimana yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kehidupan Beragama

1.1. Melaksanakan nilai-nilai agamis dalam kehidupan sehari-hari

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan :

- Meningkatkan dukungan fasilitas pelaksanaan nilai-nilai agamis dalam kehidupan sehari-hari.
- Meningkatkan pelaksanaan kehidupan beragama yang berkualitas dan lebih religius.
- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keagamaan dalam kehidupan beragama.

2. Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah

Dalam misi ini dengan meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah, maka pembangunan daerah dilaksanakan dengan :

2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, meliputi:

- Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, terdiri dari bidang pemerintahan dan bidang hukum.
- Kualitas sumber daya manusia ini terdiri dari layanan pendidikan, layanan kesehatan.
- Pemasyarakatan dan peningkatan prestasi pada bidang olah raga seni dan budaya.

2.2. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian secara luas, industri kecil, dan pariwisata, meliputi:

- Sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
- Sektor pariwisata dan industri pariwisata.
- Sektor industri kecil dan menengah.

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah

Dalam misi ini pembangunan daerah dilaksanakan dengan :

3.1. Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktivitas dan kinerja dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, meliputi :

- Peningkatan pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah, Perimbangan dan Penerimaan Sah lainnya).
- Perekonomian masyarakat (Sektor industri, sektor perdagangan dan jasa, sektor usaha mikro, kecil dan menengah, dan koperasi koperasi).

3.2. Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas, penataan ruang dan pengembangan kawasan pembangunan

- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
- Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, ketersediaan fasilitas transportasi dan fasilitas umum lainnya
- Pengembangan Kawasan Pembangunan Agropolitan
- Penataan tata ruang dan lingkungan
- Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan.

4. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi dan Informatika

Dalam misi ini dengan memanfaatkan teknologi dan informatika

- Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan Iptek dalam upaya menumbuh kembangkan kapasitas produksi.
- Meningkatkan penyebaran informasi dan pemanfaatannya guna mendukung pembangunan daerah.

Selanjutnya akan dikemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan Visi dan Misi Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Dipaparkan juga apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati HSS. Secara sederhana dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis dan Produktif

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kehidupan Beragama			
1.1	Melaksanakan nilai-nilai			

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>agamis dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>a. Meningkatkan dukungan fasilitas pelaksanaan nilai-nilai agamis dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>b. Meningkatkan pelaksanaan kehidupan beragama yang berkualitas dan lebih religius</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keagamaan dalam kehidupan beragama</p>	<p>Kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan nilai-nilai agamis</p> <p>Tingginya Motivasi dalam pelaksanaan kehidupan beragama</p> <p>Kurangnya koordinasi antar instansi/lembaga</p>		
2	<p>Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi</p> <p>2.1 Daerah</p> <p>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, meliputi:</p> <p>a. Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, terdiri dari bidang pemerintahan dan bidang hukum.</p> <p>b. Kualitas sumber daya manusia ini terdiri dari layanan pendidikan, layanan kesehatan.</p>	<p>- Koordinasi antar instansi vertikal dan horisontal belum optimal.</p> <p>- Kompetensi dan jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas</p> <p>- Motivasi dan</p>		

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
c.	Pemasyarakatan dan peningkatan prestasi pada bidang olah raga seni dan budaya	<p>keseriusan pegawai untuk menciptakan good governance</p> <ul style="list-style-type: none"> - Referensi data dan informasi yang masih rendah - Dukungan sumber daya manusia yang potensial - Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan 		
2.2.	Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian secara luas, industri kecil, dan pariwisata, meliputi:			
a.	Sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan,	- Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan		
b.	perkebunan dan kehutanan.			
c.	Sektor pariwisata dan industri pariwisata	- Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal		
	Sektor industri kecil dan menengah			
3.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah			
3.1.				

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktivitas dan kinerja dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah meliputi:</p> <p>a. Peningkatan pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah, Perimbangan dan b. Penerimaan Sah lainnya). Perekonomian masyarakat (Sektor industri, sektor perdagangan dan jasa, sektor usaha mikro kecil dan menengah, dan koperasi)</p> <p>3.2. Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas, penataan ruang dan pengembangan kawasan pembangunan</p> <p>a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur</p> <p>b. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, ketersediaan fasilitas transportasi dan fasilitas umum lainnya</p> <p>c. Pengembangan Kawasan Pembangunan Agropolitan</p> <p>d. Penataan tata ruang dan lingkungan</p> <p>e. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan regulasi menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan - Dukungan sumber daya manusia yang potensial - Dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan. - Referensi data dan informasi yang masih rendah 		

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	<p>Meningkatkan pemanfaatan Teknologi dan Informatika</p> <p>a. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan Iptek dalam upaya menumbuhkembangkan kapasitas produksi.</p> <p>b. Meningkatkan penyebaran informasi dan pemanfaatannya guna mendukung pembangunan daerah</p>	<p>Dukungan sarana prasarana yang memadai.</p> <p>Terbatasnya kompetensi SDM dalam penguasaan teknologi informasi</p>		

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Renstra Kementerian Sosial maka Visi dan Misi Kementerian Sosial yaitu :

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”

Kementerian Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Kementerian Sosial menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan;

4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sedangkan tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial adalah :

1. Melindungi PMKS dari segala risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
2. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
3. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan risiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
4. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
5. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
6. Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks - penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
7. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
8. Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua provinsi, kabupaten dan kota.

Hal ini akan diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan terkait dengan prioritas pembangunan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 melalui 6 (enam) prioritas utama yaitu, kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Di tingkat Nasional masalah penduduk miskin dan belum tuntasnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih menjadi isu penting dan tetap memerlukan perhatian dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Tabel 3.2

Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dengan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia

Uraian	Dinas Sosial Prov. Kalsel	Kementerian Sosial RI
Visi	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS; 2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS; 3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan; 4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan; 5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah dan mengurangi tumbuh kembang serta meluasnya masalah kesejahteraan sosial; 2. Mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup yang layak dan nomatif; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas kesejahteraan sosial; 4. Meningkatkan pelayanan dan bantuan sosial bagi korban bencana dan masalah lainnya; 5. Meningkatkan peran serta sosial masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

	<p>menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;</p> <p>6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p>	
--	--	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan menengah, serta sebagai tempat hunian yang nyaman dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, agamis, dan produktif dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi : Kebijakan pengembangan kawasan lindung dan Kebijakan Rencana Kawasan Budaya. Sedangkan Kebijakan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi : Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya; dan Kawasan Strategis Penyelematan Lingkungan Hidup.

Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial sehingga layanan yang ada tidak merubah fungsi lahan dan merubah pola ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Kabupaten dan Kajian terhadap Renstra K/L, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Isu-isu strategis Dinas Sosial berdasarkan tupoksinya dapat disajikan pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok	Fungsi	Isu Strategis
Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan; 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan; 3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kemiskinan di Kab. HSS tahun 2013 sesuai data dari BPS Kalsel adalah sebesar 6,67%. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi KalSel tahun 2013 sebesar 4,76 %. Untuk itu kesejahteraan masyarakat Kab. HSS perlu ditingkatkan guna menurunkan angka kemiskinan; 2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan karena sangat dibutuhkan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial; 3. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, maka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan. Hal ini sesuai

	<p>Pahlawan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 6. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial. 	<p>dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Nilai-nilai kepahlawanan perlu dilestarikan agar pergeseran-pergeseran norma yang terus terjadi dimasyarakat tidak melunturkan rasa patriotisme, semangat juang ,semangat kepahlawanan dan menghargai para pejuang; 5. Pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial masih perlu lebih ditingkatkan menuju pelayanan prima.
--	---	--

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat.

Bagi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum SKPD dan arah pembangunan yang telah berlaku secara resmi dan sah secara hukum baik dalam RPJP Daerah maupun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perumusan visi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus dapat mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dalam konteks pembangunan daerah/wilayah yang bersangkutan. Fungsi daerah dalam perumusan visi perlu diperhatikan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Sementara itu peran harus mengarah pada penciptaan kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan visi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, termasuk informasi normatif, berupa RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah disusun. Hasil rumusan **visi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan** yaitu:

“TERWUJUDNYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL”

Sesuai dengan visi tersebut di atas, **misi yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan** adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan sosial dan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial;

2. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

a. Tujuan :

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan pembangunan dibidang Sosial yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin;
- 2) Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 3) Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
- 4) Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
- 6) Meningkatkan perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);
- 7) Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
- 8) Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
- 9) Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- 10) Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

b. Sasaran :

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses pencapaian visi misi dinas.

Adapun sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin;
- 2) Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 3) Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
- 4) Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas;
- 5) Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
- 6) Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);
- 7) Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
- 8) Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
- 9) Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- 10) Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	85,81%	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya				83,41 %	85,81 %
2	Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	79,39%	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS				52,02 %	79,39 %

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90%	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya				90%	90%
		Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90%		Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya				90%	90%
4	Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	10%	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri				6,25 %	10%
5	Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	40%	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya				25%	40%
6	Meningkatkan perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku	21,27%	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku				21,27 %	21,27 %
		Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	20%		Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku				20%	20%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100%	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari				100%	100%
8	Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya	50%	Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya				50%	50%
9	Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	100%	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran				100%	100%
		Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	100%		Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik				100%	100%
10	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80	81
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100%		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti				100%	100%
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP				BB	A

		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti				100%	100%
--	--	--	------	--	--	--	--	--	------	------

4.3 Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengaktualisasikan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Melaksanakan peningkatan kualitas dan peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial;
- 3) Melaksanakan pelayanan sosial dan pemberian bantuan atau jaminan sosial bagi anak dan lanjut usia terlantar;
- 4) Melaksanakan pelayanan sosial dan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas;
- 5) Melaksanakan pelayanan sosial dan bantuan sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
- 6) Melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS jalanan/tuna sosial lainnya;
- 7) Melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam;
- 8) Melaksanakan pelayanan sosial bagi korban tindak kekerasan;
- 9) Penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
- 10) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang sosial.

b. Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

- 1) Menyelenggarakan pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin melalui pemberian modal usaha dan pendampingan;
- 2) Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra);
- 3) Fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- 4) Pembinaan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- 5) Pembinaan terhadap anak terlantar/putus sekolah melalui pengiriman anak terlantar/putus sekolah ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) serta pemberian modal usaha;
- 6) Pemberian bantuan sosial kepada anak yatim dari keluarga miskin;
- 7) Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar;
- 8) Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas;
- 9) Pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
- 10) Penertiban, pembinaan dan pemulangan PMKS jalanan/tuna sosial lainnya;
- 11) Pemberian bantuan sosial kepada korban bencana alam;
- 12) Pembinaan relawan sosial penanggulangan bencana (TAGANA);
- 13) Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi korban tindak kekerasan;
- 14) Peringatan hari-hari bersejarah nasional;
- 15) Pemberian santunan kepada veteran dan janda veteran;
- 16) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- 17) Pemenuhan SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang baik untuk fasilitasi pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial.

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan bidang sosial.			
MISI I : Meningkatkan pemberdayaan sosial dan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Melaksanakan pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin melalui pemberian modal usaha dan pendampingan; 2. Penyaluran Beras Sejahtera; 3. Fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Melaksanakan peningkatan kualitas dan peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam usaha kesejahteraan sosial	Pembinaan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

VISI : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan bidang sosial.			
MISI II : Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Melaksanakan pelayanan sosial dan pemberian bantuan atau jaminan sosial bagi anak dan lanjut usia terlantar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan terhadap anak terlantar/putus sekolah melalui pengiriman anak terlantar/putus sekolah ke Panti Sosial Bina

			<p>Remaja (PSBR) serta pemberian modal usaha;</p> <p>2. Pemberian bantuan sosial kepada anak yatim dari keluarga miskin;</p> <p>3. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar lanjut usia terlantar.</p>
Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas	Melaksanakan pelayanan sosial dan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas	Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas
Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Melaksanakan pelayanan sosial dan pemberian bantuan sosial kepada perempuan rawan sosial ekonomi	Pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi perempuan rawan sosial ekonomi
Meningkatkan perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS jalanan / Tuna Sosial lainnya	Penertiban, pembinaan dan pemulangan PMKS jalanan/tuna sosial lainnya
Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Melaksanakan pemberian bantuan sosial kepada korban bencana alam	<p>1. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar korban bencana alam;</p> <p>2. Pembinaan relawan sosial penanggulangan bencana (TAGANA)</p>
Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak	Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak	Melaksanakan pelayanan sosial bagi korban tindak kekerasan	Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar korban tindak kekerasan

kekerasan	kekerasan		
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang sosial	Pemenuhan SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang baik untuk fasilitasi pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial

VISI : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan bidang sosial.

MISI III : Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan hari-hari bersejarah nasional; 2. Pemberian santunan kepada veteran dan janda veteran; 3. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

5.1 Program dan kegiatan yang dilaksanakan

1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Kegiatan penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi/teknis lainnya
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- Pembangunan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, terdiri dari kegiatan :

- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
- Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
- Pendampingan usaha bagi keluarga miskin
- Penyaluran pangan bagi masyarakat miskin
- Koordinasi program rumah sejahtera
- Pendukung Program Keluarga Harapan (PKH)
- Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :

- Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia.
- Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana.
- Peningkatan kualitas pendataan PMKS
- Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

- Pelayanan sosial bagi lanjut usia miskin dan terlantar
- Penyediaan bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Perlindungan sosial bagi korban bencana

6. Program Pembinaan Anak Terlantar, terdiri dari kegiatan :

- Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.
- Peningkatan pelayanan sosial terhadap anak

7. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, terdiri dari kegiatan :

- Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

8. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PKS, narkoba dan penyandang penyakit sosial lainnya, terdiri dari kegiatan :

- Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
- Peningkatan pelayanan sosial bagi eks panyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar
- Pemberdayaan sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :

- Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
- Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
- Pembinaan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan
- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Peningkatan peran aktif organisasi dan relawan penanggulangan bencana
- Peningkatan kesetiakawanan sosial masyarakat
- Pembinaan Pembinaan Karang Taruna
- Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

- Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- Pembinaan Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
- Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat

10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

11. Program pengelolaan Areal Pemakaman, terdiri dari kegiatan :

- Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman.

12. Program Keluarga Harapan, terdiri dari kegiatan :

- Peningkatan kinerja pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

13. Program Penyuluhan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari kegiatan :

- Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Sejahtera

14. Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial, terdiri dari kegiatan :

- Pembinaan/sosialisasi pengumpulan uang, barang dan undian gratis berhadiah

Keterangan :

-  Program yang ada pada tahun anggaran 2017 dan 2018
-  Kegiatan yang ada pada tahun anggaran 2017 dan 2018

5.2 Indikator Program dan Kegiatan

Indikator Program dan kegiatan untuk menunjang visi dan misi Dinas Sosial secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	13	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	0	100%	465.769.750	100 %	418.062.300	100%	687.143.496	100%	835.001.035	100%	851.724.800	100 %	3.257.701.381	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS
						01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai untuk administrasi kantor	0	100%	1.230.000	100%	6.850.000	100%	27.292.000	520 Lembar	2.770.000	580 Lembar	2.852.000	580 lembar	40.994.000	Sekretariat
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	0	100%	58.677.800	100%	76.222.000	100%	81.699.996	19 rekening	91.902.000	19 rekening	93.740.000	19 rekening	402.241.796	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS			
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Mobil operasional laik jalan; Kendaraan operasional laik jalan	0	100%	13.100.000	100%	11.400.000	100%	12.400.000	5 Unit; 13 Unit	15.000.000	5 Unit; 13 Unit	15.300.000	5 Unit; 13 Unit	67.200.000	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS

		Persentase temuan BPK/Inspektoral yang ditindaklanjuti				07	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pawai pembangunan (Mobil Hias) dan pameran pembangunan (Kandangan Expo)	0	0	0	0	0	2 kegiatan	11.000.000	2 kegiatan	11.000.000	2 kegiatan	11.220.000	2 kegiatan	33.220.000	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS
						09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang dipelihara	0	100%	14.950.000	100%	19.200.000	100%	16.450.000	44 unit	15.050.000	44 unit	15.350.000	44 unit	81.000.000	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS
						10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	0	100%	37.865.050	100%	34.082.200	100%	46.412.100	43 jenis	47.307.850	45 jenis	48.254.000	45 jenis	213.921.200	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS
						11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen yang disediakan	0	100%	19.684.600	100%	18.459.600	100%	18.459.600	5 jenis	10.825.360	6 jenis	11.041.800	6 jenis	78.470.960	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS
						12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0	100%	10.894.800	100%	4.783.000	100%	3.409.000	8 jenis	3.409.000	8 jenis	3.477.000	8 jenis	25.972.800	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS
						13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan	0	100%	119.022.500	100%	44.490.500	100%	101.288.800	37 jenis	162.204.825	37 jenis	165.448.000	37 jenis	592.454.625	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS

			07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	0	100%	430.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	430.550.000	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor dengan kondisi baik; Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	0	0	0	100%	60.950.000	100%	53.000.000	1 buah	30.000.000	2 buah; 1 lokasi	122.000.000	2 buah; 1 lokasi	265.950.000	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil operasional laik jalan 5 unit; kendaraan operasional laik jalan	0	100%	60.180.000	100%	73.720.000	100%	64.200.000	5 unit; 13 unit	72.880.000	5 unit; 13 unit	74.337.000	5 unit; 13 unit	345.317.000	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS
1	13	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin kerja aparatur	0	0	0	100%	3.125.000	0	0	0	0	0	0	100%	3.125.000	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS
			02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pejabat eselon II	0	0	0	100%	3.125.000	0	0	0	0	0	0	100%	3.125.000	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS
1	13	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti; Indikator nilai hasil evaluasi AKIP;	0	100%	5.938.400	100%	3.379.600	100%	6.200.000	100 %; BB Nilai; 100 %	6.052.000	100 %; A Nilai; 100 %	6.137.000	100 %; A Nilai; 100 %	27.707.000	Sekretariat	Dinas Sosial Kab. HSS

				usaha bagi keluarga miskin	direhabilitasi																
			15	08	Penyaluran Pangan bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang mendapatkan bantuan beras sejahtera	0	0	0	0	0	15.372 RTS-PM	271.726.200	15.238 RTS-PM	279.533.080	15.238 RTS-PM	299.578.136	15.238 RTS-PM	850.837.416	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. HSS
			15	11	Koordinasi Progam Rumah Sejahtera	Jumlah rumah keluarga miskin tidak layak huni yang direhabilitasi	2.312 buah	0	0	0	0	0	0	600 buah	238.406.250	425 buah	238.406.250	1.025 buah	476.812.500	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. HSS
			15	12	Pendukung Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. HSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	327.925.000	100%	327.925.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. HSS
			15	1	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT	Jumlah petugas dan pendamping sosial yang meningkat kemampuannya	0	0	0	0	0	0	0	86 Orang	416.275.000	0	0	86 Orang	416.275.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. HSS

						dan PMKS lainnya																	
			1	13	25	Program Penyuluhan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin	0	200 keluarga	504.189.000	0	0	0	0	0	0	0	200 keluarga	504.189.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. HSS		
					25	01	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Rumah Sejahtera	Jumlah rumah tidak layak huni yang telah direhabilitasi	2399 Buah	200 Buah	504.189.000	0	0	0	0	0	0	2599 buah	504.189.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. HSS		
Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Lembaga/Organisasi sosial yang aktif dalam pemberdayaan sosial; Cakupan relawan/petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial; Persentase veteran dan janda veteran yang telah menerima santunan/ bantuan sosial	7 PSKS	7 PSKS	732.812.300	7 PSKS	818.341.650	7 PSKS	885.922.400	54,66 %; 49,31%; 100 %	1.300.282.000	61,33 %; 85,52%; 100 %	1.378.413.294	61,33 %; 85,52%; 100 %	5.115.771.644	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. HSS	
					21	02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku pelaku	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan	7 PSKS	7 PSKS	505.004.300	7 PSKS	584.079.650	7 PSKS	595.904.900	7 PSKS	356.436.000	0	0	7 PSKS	2.041.424.850	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. HSS

			usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Sosial yang dibina															
		21	10	Pembinaan Karang Taruna	Jumlah organisasi sosial yang aktif	0	0	0	0	0	0	0	0	25 organisasi	144.277.500	25 organisasi	144.277.500	Bidang Pemberda- yaan Sosial	Kab. HSS
		21	11	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang aktif	0	0	0	0	0	0	0	0	11 orang	84.443.000	11 orang	84.443.000	Bidang Pemberda- yaan Sosial	Kab. HSS
		21	12	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang aktif	0	0	0	0	0	0	0	0	25 orang	172.307.500	25 orang	172.307.500	Bidang Pemberda- yaan Sosial	Kab. HSS
		21	13	Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 lembaga	23.388.000	1 lembaga	23.388.000	Bidang Pemberda- yaan Sosial	Kab. HSS
		21	14	Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB)	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB) yang aktif	0	0	0	0	0	0	0	0	5 buah	3.200.000	5 buah	3.200.000	Bidang Pemberda- yaan Sosial	Kab. HSS

				21	15	Pembinaan Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 lembaga	19.038.000	14 lembaga	19.038.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. HSS
				21	16	Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat	Jumlah lembaga sosial yang aktif (Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 lembaga	6.880.000	1 lembaga	6.880.000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. HSS
Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran		21	05	Pembinaan Kepeloporan, Keperintisan dan Kepahlawanan	Jumlah veteran dan janda veteran yang menerima santunan/bantuan sosial	165 orang	165 orang	227.808.000	165 orang	234.262.000	165 orang	290.017.500	112 orang	129.136.000	104 orang	319.744.294	711 orang	1.200.967.794	Bidang Perlindungan Sosial	Kab. HSS
		Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik		21	06	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	1 lokasi	0	0	0	0	0	0	1 lokasi	221.440.000	0	0	1 lokasi	221.440.000	Bidang Perlindungan Sosial	Kab. HSS
Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu		21	07	Peningkatan peran aktif organisasi dan relawan penanggulangan bencana	Jumlah relawan penanggulangan bencana (TAGANA) yang berperan aktif dalam penanggulangan	0	0	0	0	0	0	0	76 orang	547.770.000	76 orang	558.725.000	152 orang	1.106.495.000	Bidang Perlindungan Sosial	Kab. HSS

Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang meningkat kualitas hidupnya			20	07	Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah PRSE yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar	0	0	0	0	0	0	60 orang	75.408.000	60 orang	76.916.000	120 orang	152.324.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kab. HSS	
Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	1	13	17		Program pembinaan anak terlantar	Cakupan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial terhadap pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar	40 orang	40 orang	75.468.000	40 orang	111.928.000	40 orang	236.410.000	1.383 orang	152.098.000	1.117 orang	285.540.225	2.620 orang	861.444.025	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kab. HSS
					17	04	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar	40 orang	40 orang	75.468.000	40 orang	111.928.000	40 orang	236.410.000	1.383 orang	127.688.000	1.117 orang	260.642.025	2.620 orang	812.136.025	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kab. HSS
					17	07	Peningkatan Pelayanan Sosial terhadap	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan	0	0	0	0	0	0	0	1.383 orang	24.410.000	1.117 orang	24.898.000	2.500 orang	49.308.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi	Kab. HSS

					Anak	memenuhi sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar													Sosial			
		Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	1	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan terhadap pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar; Cakupan lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar lanjut usia terlantar sesuai dengan standar; Cakupan korban bencana yang	550 orang	800 orang	608.160.700	2667 orang	847.651.700	2667 orang	824.785.400	85 %; 85 %; 100 %	320.275.000	85 %; 85 %; 100 %; 90%	140.132.000	85 %; 85 %; 100 %; 90%	2.741.004.800	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan Sosial	Kab. HSS

				penanggulan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Program Keluarga Harapan (Keluarga Sangat Miskin)														Kemiskinan		
			16	26	Peningkatan Kualitas Pendataan PMKS	Jumlah kecamatan yang terdata Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	0	11 kec	74.846.900	11 kec	60.588.600	11 kec	51.175.400	0	0	0	0	11 kec	186.610.900	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kab. HSS
			16	01	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia miskin dan terlantar	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar lanjut usia terlantar sesuai dengan standar	0	0	0	0	0	0	0	3.534 orang	23.116.000	2.794 orang	23.578.000	6.328 orang	46.694.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kab. HSS
			16	13	Penyediaan bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian	0	0	0	0	0	0	0	1383 Orang; 3534 Orang; 196 Orang	182.890.000	0	0	1383 Orang; 3534 Orang; 196 Orang	182.890.000	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kab. HSS

						Sosial (PMKS)	kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar; Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar lanjut usia terlantar sesuai dengan standar; Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas sesuai dengan standar																
Meningkatkan ketepatan waktu	Meningkatnya ketepatan	Persentase pemberian bantuan bagi		16	14	Perlindungan sosial bagi korban	Persentase korban bencana yang	0	0	0	0	0	0	100%	114.269.000	100%	116.554.000	100%	230.823.000	Bidang Perlindungan Sosial	Kab. HSS		

penanganan korban bencana alam	waktu penanganan korban bencana alam	korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari				bencana	mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana																
Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	1	13	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Cakupan penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas sesuai dengan standar	146 orang	146 orang	172.718.400	146 orang	163.178.800	146 orang	157.054.000	39,62%	102.292.000	60,06%	104.338.000	60,06%	699.581.200	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kab. HSS	
					18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas sesuai dengan standar	146 orang	146 orang	172.718.400	146 orang	163.178.800	146 orang	157.054.000	196 orang	102.292.000	196 orang	104.338.000	830 orang	699.581.200	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kab. HSS

			1	13	22		Program Keluarga Harapan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar RTSM	2.114 RTSM	2.114 RTSM	267.836.300	0	0	0	0	0	0	0	2.114 RTSM	267.836.300	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. HSS
					22	01	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin yang mendapat bantuan PKH	2.114 Rumah Tangga Sangat Miskin	2.114 Rumah Tangga Sangat Miskin	267.836.300	0	0	0	0	0	0	0	2.114 Rumah Tangga Sangat Miskin	267.836.300	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. HSS
			1	04	20	06	Program pengelolaan areal pemakaman	Meningkatnya fasilitas sosial untuk masyarakat	2 TPU	1 TPU	1.615.537.500	0	0	1 TPU	884.725.000	0	0	0	2 TPU	2.500.262.500	Bidang Perlindungan Sosial	Kab. HSS
			1	04	20	06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah Tempat Pemakaman Umum yang terfasilitasi	2 TPU	1TPU	1.615.537.500	0	0	1 TPU	884.725.000	0	0	0	2 TPU	2.500.262.500	Bidang Perlindungan Sosial	Kab. HSS
			1	13	24		Program Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial	Meningkatnya kemampuan petugas pengelola Sumber Dana Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial	0	100 orang	16.322.500	0	0	0	0	0	0	0	100 orang	16.322.500	Bidang Perlindungan Sosial	Kab. HSS
						01	Pembinaan / Sosialisasi Pengumpulan Uang, Barang dan Undian Gratis Berhadiah	Jumlah peserta pembinaan Pengumpulan Uang, Barang dan Undian Gratis Berhadiah	0	100 orang	16.322.500	0	0	0	0	0	0	0	100 orang	16.322.500	Bidang Perlindungan Sosial	Kab. HSS

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini dikemukakan sasaran dan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2014-2018 yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebanyak 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Sasaran RPJMD terkait tupoksi Dinas Sosial Kab. HSS

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target RPJMD Tahun				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Menurunnya persentase kemiskinan	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	%	6,67	5,83	5,49	5,15	4,81	4,50
2	Terjaminnya kehidupan yang layak bagi lansia, anak yatim/piatu dan penyandang cacat	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	19,34 (1.536 orang)	30 (2.424 orang)	35 (2.818 orang)	40 (3.220 orang)	45 (3.630 orang)	50 (4.025 orang)

Pada Tabel di bawah ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 6.2**Indikator Kinerja Sasaran SKPD Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja pada Tahun Ke-3 periode RPJMD	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	80,25% (17.674 KK)				83,41%	85,81%	85,81%
2	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90% (1.136 Orang)				90%	90%	90%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90% (2.070 Orang)				90%	90%	90%
4	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	2,50% (24 Orang)				6,25%	10%	10%
5	Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	10% (40 Orang)				25%	40%	40%
6	Persentase gelandangan dan pengemis yang	10,63% (5 Orang)				21,27%	21,27%	21,27%

	mengalami perubahan perilaku							
7	Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	20% (1 Orang)				20%	20%	20%
8	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100% (861 Orang)				100%	100%	100%
9	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya	-				50%	50%	50%

BAB VII

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program-program strategis, disusun untuk dapat lebih menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Revisi Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, lebih dari itu agar dapat dijadikan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 sampai dengan 2018.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Revisi Rencana Strategis ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS SOSIAL

Jalan Kamboja Nomor 3 Telp. (0517) 21123 Fax. (0517) 21123
K A N D A N G A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 480 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan numenklatur SKPD dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Sosial, maka perlu dilaksanakan revisi rencana strategis dan penyempurnaan tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran (*impact*), indikator program (*outcome*), indikator kegiatan (*output*) serta target;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13 Tanggal 4 Oktober 2016);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 61 Tanggal 2 Desember 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014-2018

Pasal 1

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2014 sampai dengan 2018.

Pasal 2

- 1) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Perubahan atau Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial dikarenakan perubahan numenklatur SKPD dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Sosial dan penyempurnaan tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran (*impact*), indikator program (*outcome*), indikator kegiatan (*output*) serta target.

Pasal 4

Revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 6

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : Maret 2017

**Kepala Dinas Sosial
Kab. Hulu Sungai Selatan**



Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670328 198611 2 001